

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir)**

Oleh :

Chici Claraini

Pembimbing : Enni Savitri dan Meilda Wiguna

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : ciciclaraini@ymail.com

*The Effect Good Governance, Internal Control System The Government And Style
Leadership On The Performance Of Local Government
(Study Of a Unit of Working Units in Rokan Hilir)*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of good governance, internal control system the government and style leadership on the performance of local government in District Government in Rokan Hilir. The research samples are selected by using questionnaire survey method were many as 124 people are respondents. The population in this study is 31 working units Rokan Hilir district. The analytical tool used is multiple regression assisted with SPSS Windows ver 19. The results showed of good governance, internal control system the government and style leadership significant effect on the performance government. In this research the size of the influence inflicted R square of 0,663 shows that variable good governance, internal control system the government and the style leadership simultaneously explain performance variables of 13,8% while the rest 86,2% influenced by other variable not guilty in this study.

Keyword : Good Governance, Internal Control System the Government, Style Leadership and The Performance Government

PENDAHULUAN

Untuk menciptakan *good governance* dalam mengelola administrasi publik dewasa ini. Masyarakat menuntut agar sistem pengelolaan negara dan pengelolaan keuangan dapat dijalankan secara transparansi dan tanggung jawab. Masyarakat mengharapkan pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang

baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan

perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dilingkungan pemerintah daerah, pemerintah seharusnya melakukan reformasi dalam segala aspek pengelolaan daerah. Dimensi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara transparan, akuntabilitas dan partisipasi (*good governance*) serta didukung dengan adanya gaya kepemimpinan yang bagus (Mardiasmo, 2002). Dengan adanya *good governance* dalam hal ini FCGI (2000) menyebutkan bahwa salah satu manfaat yang bisa dipetik adalah meningkatkan kinerja melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada publik.

Menurut Trisaningsih (2007), diterapkan *good governance* diharapkan akan memberi arahan yang jelas pada perilaku kinerja serta etika profesional organisasi, upaya ini dimaksud agar kiprah maupun produk jasa yang dihasilkan akan lebih aktual dan terpercaya, untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dan optimal, Ira Amelia (2013) menyatakan *good governance* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah. Kemudian Trisaningsih (2007) menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, melainkan berpengaruh tidak langsung melalui independensi auditor.

Selain *good governance*, faktor

lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja organisasi adalah Sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset pemerintah dari kerugian atau korupsi, dan untuk memelihara keakuratan data. Setiap organisasi tak terkecuali pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hilir TA 2013. BPK RI menemukan menyajikan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, diantaranya adalah (1) persiapan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menuju Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrua! Belum Memadai; (2) Penatausahaan Persediaan Belum Tertib serta Nilai Piutang Pajak dan Retribusi Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya; (3) Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Pejabat Struktural Tidak Sesuai Ketentuan. (BPK RI, Rokan Hilir, 2013).

Nur Afrida meneliti tentang desentralisasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja manajerial SKPD pemerintah kota padang, hasil penelitian menunjukkan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Azwir Nasir dan Ranti Oktari

meneliti tentang pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD kabupaten kampar, hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah, pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Selain *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah, gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap kinerja. Gaya kepemimpinan (*leadership style*) juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja. Gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi (Elya Wati, 2010). Pemimpin merupakan pemain utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi. Pemimpin dapat memberikan pengaruh dalam menanamkan disiplin bekerja para anggota organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Gaya kepemimpinan juga dapat mempengaruhi kreatifitas kinerja dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota organisasi.

Elya Wati (2010) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor BPKP perwakilan bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik cara memimpin seseorang pimpinan/atasan auditor maka akan semakin mempengaruhi kinerja auditornya. Kemudian Febria Kurniadi (2011) menyatakan bahwa

gaya kepemimpinan dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap karyawan sedangkan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir? 2) Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir? 3) Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir ?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 2) Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 3) Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja menurut Indra Bastian (2009) menyatakan bahwa : “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi”.

Kinerja pemerintahan daerah dengan sendirinya merupakan seluruh capaian/hasil-hasil selama

pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai tingkat kinerja seperti yang diharapkan tentunya perlu dirumuskan rencana kinerja yang memuat penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi pemerintah daerah. Berdasarkan rencana strategi tersebut maka dapat diukur sejauh mana pemerintah daerah telah mampu mencapai sasaran/target (kinerja) yang telah diterapkan baik dengan indikator kuantitatif maupun kualitatif.

Kinerja dapat digambarkan sebagai fungsi proses dari respon individu terhadap ukuran kinerja yang diharapkan organisasi, yang mencakup desain kerja, proses pemberdayaan, dan pembangunan dari sisi individu itu sendiri yang mencakup keterampilan, kemampuan dan pengetahuan. Kinerja merupakan hasil dari suatu proses perpaduan kapabilitas individu dengan sikap individu terhadap aspek pekerjaan dan organisasi.

Menurut Bastian (2006), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhitungkan 6 indikator kinerja, yaitu : 1) Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 2) Indikator proses (Process) adalah organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 3) Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa

fisik/nonfisik. 4) Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) 5) Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 6) Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Seperti halnya kinerja pemerintahan daerah dengan sendirinya merupakan semua hasil-hasil yang didapatkan ataupun hasil-hasil yang dicapai selama berjalannya pelaksanaan otonomi daerah yang tentunya untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan, dan tentunya ini semua memuat tentang penjabaran sasaran dan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan rencana strategis pemerintah daerah (Mardiasmo,2005).

Good Governance

Good governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Selain itu, istilah *governance* tidak hanya berarti ke pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga

mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan dan, penyelenggara.

Munculnya konsep *good governance* di Indonesia sebagai reaksi atas perilaku pengelolaan perusahaan yang tidak memperhitungkan *stakholder*-nya. Hal ini terlihat jelas ketika krisis terjadi di Indonesia sejak tahun 1997. Krisis tersebut memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata tidak didukung struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar kita menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang tidak baik dan sarat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (Trisnaningsih, 2007).

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN. Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparaturnya. (Siti Aisyah, 2014).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien.

Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah : Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Gaya Kepemimpinan

Seorang pemimpin akan memperlihatkan gaya kepemimpinannya kedalam situasi tertentu, melalui ucapan, sikap dan tingkah laku yang dirasakan diri sendiri maupun oranglain. Seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain, yang didalam pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi memerlukan bantuan orang lain. Sebagai seorang pemimpin ia mempunyai peranan yang aktif dan selalu ikut campur tangan dalam segala masalah yang berkenan dengan kebutuhan anggota kelompoknya. Kepemimpinan telah didefinisikan dalam kaitannya dengan ciri-ciri individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, tempatnya pada suatu posisi administrasi.

Hasibuan (2007:46), menyatakan bahwa salah satu tugas pimpinan adalah memotivasi kerja karyawan, seorang manajer harus

dapat mendorong para bawahannya untuk bekerja giat dan membina bawahan dengan baik, sehingga tercipta suasana kerja yang baik dan harmonis.

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. *Good governance* merupakan semboyan yang sedang gencar-gencarnya dipromosikan oleh Pemerintah. Semboyan tersebut adalah hal yang sangat didambakan oleh sektor publik maupun swasta, mengingat efek dominan yang banyak didapatkan dari *good governance* itu sendiri. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Hasil penelitian Elya Wati (2010) menyatakan *good governance* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah

FCGI (2000) menyebutkan dengan melaksanakan *good governance*, salah satu manfaat yang bisa dipetik adalah meningkat kinerja melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta meningkatkan pelayanan kepada publik. Menurut Trisnaningsih (2007) mengatakan bahwa diterapkan *good governance* diharapkan akan memberi arahan yang jelas pada perilaku kinerja serta etika profesi organisasi, uaya ini

dimaksud agar kiprah maupun produk jasa yang dihasilkan akan lebih aktual dan terpecaya untuk mewujudkan kinerja yang lebih optimal dan lebih baik. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: *Good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian Ira Amelia (2013) meneliti mengenai pengaruh *good governance*, pengendalian intern dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah daerah disimpulkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah .

H2: pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

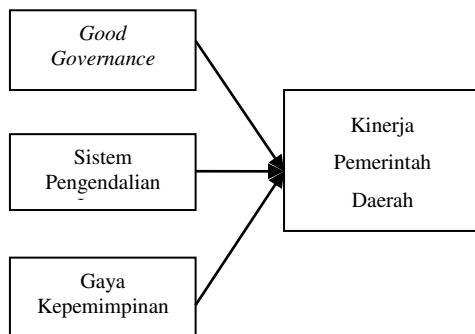
Gaya kepemimpinan berkenaan dengan cara-cara yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat mempengaruhi bawahan sesuai dengan kemauan pemimpin maka

seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi kepada bawahannya dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (Siti Aisyah, 2014)

Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemimpin adalah pemain utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi. Pemimpin dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja dan pengaruh dalam menanamkan disiplin bekerja pada para anggota organisasi. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Gambar 1
Model Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olan, 2016.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah yang ada dibawah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dengan Jabatan Eselon III dan IV. Pemilihan sample pejabat eselon III (Kabag/Kasi/Setingkat) dan IV (Kasubag/ Kasubbid/ Setingkat) didasarkan atas pertimbangan bahwa

pejabat tersebut setingkat dengan *low* dan *middle* manajer yang secara teknis terlibat dalam penilaian kinerja dan penentu kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Pengambilan objek penelitian dipemerintah daerah disebabkan adanya tuntutan yang lebih besar dari masyarakat agar pemerintah lebih efisien, transparan dan akuntabel dalam implementasi APBD yang berasal dari uang rakyat.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer, dimana data-data penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber-sumber asli yang berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan oleh peneliti.

Data tersebut diperoleh melalui kuesioner yang berupa beberapa pertanyaan secara terstruktur, dimana responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada beberapa alternatif tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *survey*. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada kantor SKPD Kabupaten Rokan Hilir, pengiriman kuesioner, dikirimkan sendiri oleh peneliti secara langsung kepada masing-masing kantor. Pengiriman kuesioner tersebut rencananya dilakukan sendiri oleh peneliti dengan tujuan agar tingkat pengembaliannya (*response rate*) kuesioner bias lebih tinggi, sedangkan untuk pengambilan kuesioner dengan penetapan batas akhir tanggal pengambilan kuesioner. Sebelum pengambilan kuesioner, sehari sebelumnya peneliti menghubungi masing-masing dinas via telpon untuk memastikan apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden telah diisi sesuai dengan kriteria responden dan sudah bisa diambil.

Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda. Adapun bentuk matematis analisis regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = *Good Governance*

X_2 = Pengendalian Intern

X_3 = Gaya Kepemimpinan

e = Galat/faktor pengganggu (*error terms*)

Defenisi Operasional variabel

Kinerja pemerintahan daerah (Y) dengan sendirinya merupakan seluruh capaian/hasil-hasil selama pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai tingkat kinerja seperti yang diharapkan tentunya perlu dirumuskan rencana kinerja yang memuat penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi pemerintah daerah. Berdasarkan rencana strategi tersebut maka dapat diukur sejauh mana pemerintah daerah telah mampu mencapai sasaran/target (kinerja) yang telah diterapkan baik. Pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert yang dimulai dari skala 1 'sangat tidak setuju' sampai 5 menunjukkan 'sangat setuju'

Good governance (X1) adalah pemahaman atas konsep tata kelola yang baik oleh para aparat pemerintah daerah. Penerapan ini berprinsipkan solid dan bertanggung

jawab yang sejalan dengan demokrasi. Instrumen pemahaman oleh *Indonesian Institute of Corporate Governance* diukur dengan empat indicator variable yaitu : prinsip keadilan, transparansi akuntabilitas, dan tanggung jawab. Pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert yang dimulai dari skala 1 'sangat tidak setuju' sampai skala 5 menunjukkan 'sangat setuju'.

Menurut PP no 8 Tahun 2006, system pengendalian intern (X2) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, serta dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern diukur dengan instrument yang dikembangkan oleh Prasetyomo (2007). Instrument tersebut terdiri dari 10 butir pertanyaan mengenai informasi yang berhubungan dengan pengendalian intern, dengan menggunakan skala Likert 5 poin (1=sangat tidak setuju dan 5=sangat setuju).

Gaya kepemimpinan (X3) adalah gaya pimpinan yang memberi wewenang secara luas kepada para bawahannya. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai tim yang

utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Variabel gaya kepemimpinan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrument. Instrument terdiri dari 5 item gaya kepemimpinan konsistensi dan 4 item gaya kepemimpinan struktur inisiatif. Pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert yang dimulai dari skala 1 'sangat tidak setuju' sampai skala 5 menunjukkan 'sangat setuju'.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisa deskriptif akan membahas kesimpulan yang diperoleh atas kecenderungan responden dalam menjawab kuesioner yang diajukan. Berdasarkan jawaban responden penulis kemudian melakukan interpretasi.

Berdasarkan tanggapan dari responden kinerja pemerintah, *Good governance*, Sistem pengendalian pemerintah dan gaya kepemimpinan di Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan dengan baik.

Hasil Uji Validitas Data

Variabel dependen Kinerja Pemerintah yang dijelaskan dengan 6 item seluruhnya dinyatakan valid.

Variabel independen *Good Governance* yang dijelaskan dengan 13 item, variabel independen Sistem pengendalian intern pemerintah yang dijelaskan dengan 15 item dan variabel independen gaya kepemimpinan yang dijelaskan dengan 9 item seluruhnya dinyatakan valid.

Hasil Uji Reabilitas Data

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruksi. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,60 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2006).

Tabel 1
Uji Reabilitas Data

No.	Variabel	Alpha Cronbach's	Batas Reliabilitas	Ket
1.	Good Governance (X1)	0,677	0,600	Reliabel
2.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	0,608	0,600	Reliabel
3.	Gaya Kepemimpinan (X3)	0,620	0,600	Reliabel
4.	Kinerja Pemerintah (Y)	0,624	0,600	Reliabel

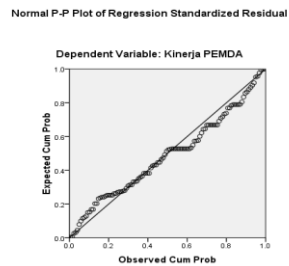
Sumber : Data Olahan, 2016.

Dari tabel diatas diperoleh nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel > 0,6. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel/dapat dipercaya.

Hasil Uji Normalitas data

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.

Gambar 2
Uji Normalitas Data



Sumber : Data Olahan, 2016.

Dapat dilihat dari gambar *Normal P-Plot* data tidak menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji MultiKolinearitas

Suatu variabel dikatakan terbebas dari penyimpangan multikolinieritas, apabila nilai tolerance diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10.

Tabel 2
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		KETERANGAN
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Good Governance	.988	1.012	Bebas Multikolinearitas
Sistem Pengendalian Intern	.888	1.126	Bebas Multikolinearitas
Gaya Kepemimpinan	.893	1.120	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Data Olahan, 2016

Dari tabel diatas diperoleh perhitungan hasil analisis data diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji Durbin Waston adalah salah satu cara mudah untuk mendeteksi autokorelasi.

Tabel 3
Uji Autokolelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.401 ^a	.161	.138	1.72496	2.176

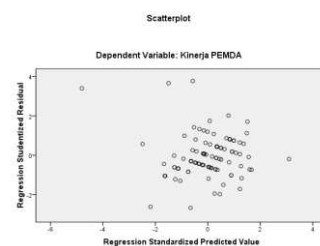
Sumber : Data olahan, 2016.

Dapat dilihat hasil uji Durbin-Watson (*DW test*) adalah sebesar 2.306.dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 112, serta k = 3 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dU sebesar 1.747. Karena nilai DW (2.176) berada pada daerah $dU < dw < 4 - dU$ ($1.747 < 2.176 < 4 - 1.747$), maka hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya autokorelasi yang berarti bahwa data ini tidak bias dan layak untuk digunakan.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik Plot (Scatterplot) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID).

Gambar 3
Uji Heteroskadastisitas



Sumber : Data olahan, 2016.

Berdasarkan grafik di atas,

terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis) untuk hipotesis satu, dua dan tiga.

Tabel 4
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.805	4.070		2.655	.009
Good Governance	.108	.046	.210	2.362	.020
Sistem Pengendalian	.116	.056	.195	2.085	.039
Gaya Kepemimpinan	.143	.067	.199	2.128	.036

Sumber : Data Olahan, 2016.

Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 10.805 + 0.180X_1 + 0.116X_2 + 0.143X_3$$

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah (H1)

Diketahui nilai t_{tabel} sebesar 2.363 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai t_{hitung} variabel Kinerja Pemerintah sebesar 2.069 dengan signifikansi 0.020. Dengan demikian t_{hitung} (2.363) > t_{tabel} (1.981) dengan signifikansi (0.020) < (0.05), jadi dapat disimpulkan bahwa

H₁ diterima, yang menyatakan bahwa *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah.

Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah ini ditunjukkan dari hasil rata-rata tiap item pertanyaan kuisisioner yang tinggi dimana adanya akuntabilitas, kejelasan sasaran dan tujuan yang dilaksanakan, indikator kinerja diperlukan untuk mengukur kegiatan dan mengavaluasi kegiatan yang berdasarkan standar yang berlaku. Menjelaskan tentang laporan pertanggung jawaban dengan melakukan pengumuman anggaran terhadap masyarakat untuk dapat meningkatkan transparansi anggaran dan dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan keadilan atau kebutuhan yang kegiatan lakukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elya Wati (2010) dan Trisnaningsih (2007) yang menyatakan bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Pemerintah. Menurut Trisnaningsih (2007) mengatakan bahwa diterapkan *good governance* diharapkan akan memberi arahan yang jelas pada perilaku kinerja serta etika profesi organisasi, upaya ini dimaksud agar kiprah maupun produk jasa yang dihasilkan akan lebih aktual dan terpecah untuk mewujudkan kinerja yang lebih optimal dan lebih baik.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah (H2)

Diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1.981 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai t_{hitung} variabel Kinerja Pemerintah sebesar 2.085 dengan signifikansi 0.030. Dengan demikian

t_{hitung} (2.085) > t_{tabel} (1.981) dengan signifikansi (0.039) < (0.05), jadi dapat disimpulkan bahwa **H₂ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah dapat dilihat dari terlaksananya dengan baik kesemua indikator SPIP dalam pernyataan yang terdapat pada kuisisioner. Dimulai dari lingkungan pengendalian terdapat kode etik tertulis dan semua aparat mengetahuinya, adanya pimpinan berperilaku etis, satuan pengawasan inter terdiri dari staf yang kompeten, dan telah dilaksanakan dengan sangat baik penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tesmasmi (2013), dan Ira Amelia (2013) yang menyatakan bahwa Pengawasan Kualitas Laporan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pengawasan dilakukan, tingkat akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah juga meningkat sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas. Sebaliknya jika tingkat pengawasan menurun, tingkat akuntabilitas kinerja pun ikut mengalami penurunan.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pemerintah. (H₃)

Diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1.981 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi,

diketahui nilai t_{hitung} variabel Kinerja Pemerintah sebesar 2.128 dengan signifikansi 0.002. Dengan demikian t_{hitung} (2.128) > t_{tabel} (1.981) dengan signifikansi (0.036) < (0.05), jadi dapat disimpulkan bahwa **H₃ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pemerintah ini ditunjukkan dari hasil rata-rata tiap item pertanyaan kuisisioner yang tinggi dimana adanya hubungan atasan dan bawahan yang berkerja sangat dekat, saling percaya antara atasan dan bawahan, suasana kekeluargaan, menghargai gagasan bawahan peruntuk kepada atasan, harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, pimpinan memberikan arahan dalam mengerjakan tugas dan pimpinan selalu menekankan pekerjaan dengan memfokuskan pada tujuan dan hasil, yang terakhir adanya struktur inisiatif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mediaty, (2010) menyatakan dalam penelitiannya tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemimpin adalah pemain utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi. Pemimpin dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja dan pengaruh dalam menanamkan disiplin bekerja pada para anggota organisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini Artinya dengan tingginya Penerapan *Good Governance* maka semakin baik Kinerja Pemerintah.
- b. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah. Dimana semakin baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka Kinerja Pemerintah juga semakin baik.
- c. Terdapat pengaruh positif Gaya Kepemimpinan Kinerja Pemerintah. Artinya semakin baik Gaya Kepemimpinan maka semakin tinggi Kinerja Pemerintah.
- d. Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi 0.138 atau 13,8%. Angka ini menjelaskan bahwa 13,8% Kinerja Pemerintah dipengaruhi oleh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan. Sedangkan sisanya 86,2% Akuntabilitas Kinerja dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti peran monitoring, evaluasi, kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi, budaya organisasi dan yang lainnya.

Saran

Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka disarankan untuk penelitian yang akan datang memperhatikan hal-hal berikut :

1. Bagi penulis untuk masa yang akan datang dalam mengisi kuisioner sebaiknya responden di dampingi langsung oleh peneliti agar informasi yang didapatkan responden lebih tepat.
2. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan sumber pembelajaran dan referensi bagi akademis yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Nur 2010, *Pengaruh desentralisasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja manajerial skpd (Studi Empiri spada Pemerintah Kota Padang)*. Pekbis Jurnal.
- Aisyah, Siti. 2013. *Pengaruh Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah*. Skripsi Universitas Riau.
- Amelia, Ira. 2013. *Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi Universitas Riau.
- Azwir Nasir & Ranti Oktari, 2013. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan*

- Pengendalian Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.* Jurnal Universitas Riau
- Badan Pemeriksaan Keuangan. 2013. *Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013*, (Online), (<http://www.bpk.go.id/>)
- Bastian, indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta
- Elya Wati, 2010. *Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor Pemerintah*, Purwokerto: Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Fajra Kurniadi, Febria, 2011. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Motifasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- FCGI (*Forum For Corporate In Indonesia*) 2002. *Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) The Essence Of Good Corporate Governance. Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Synergy Communication. Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Malayu, S.P. Hasibuan 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan kesembilan, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mediaty, 2010. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Gaya kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah*, Pekbis Jurnal
- Meriem, Temasmi, 2013. *Pengaruh Komitmen Karyawan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah*. *Pekbis Jurnal Vol 4, No. 2 .2013*
- Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 *Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Trisnaningsih, Sri. 2007. *Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Corporate Governance, gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor*, Jawa Timur: Simposium Nasional Akuntansi